

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Fenomena kekerasan berbasis gender online (KBGO) merupakan dampak nyata dari perkembangan teknologi digital yang tidak hanya membuka ruang interaksi baru, tetapi juga memunculkan pola kekerasan yang kompleks dan sulit dikendalikan. Penelitian ini menegaskan bahwa KBGO bukanlah isu sepele, melainkan perpanjangan dari ketimpangan kekuasaan berbasis gender yang telah ada di dunia nyata. Bentuk-bentuk KBGO seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, doxing, atau cyberstalking memberikan dampak serius bagi korban, mulai dari trauma psikologis, kehilangan rasa aman, hingga terhambatnya kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang peneliti, KBGO harus dipandang sebagai isu multidimensional yang membutuhkan solusi kolektif, baik melalui literasi digital, regulasi hukum yang tegas, maupun pembentukan ekosistem digital yang lebih aman dan inklusif.

Berdasarkan konteks ini, SAFEnet melalui akun Instagram @awaskbgo memainkan peran penting sebagai wadah yang fokus pada advokasi hak-hak digital. Peneliti menilai bahwa langkah SAFEnet menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye digital menunjukkan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap KBGO. Konten edukatif, panduan praktis, serta dukungan psikososial yang diberikan melalui @awaskbgo tidak hanya membangun kesadaran kolektif, tetapi juga memberikan ruang aman bagi

para korban untuk berbagi pengalaman dan mencari pertolongan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap KBGO memerlukan sinergi antara teknologi, aktivisme, dan solidaritas sosial, bukan hanya bergantung pada mekanisme hukum formal.

Dari sudut pandang peneliti, keberhasilan gerakan SAFEnet menunjukkan bahwa penelitian tentang KBGO tidak hanya berhenti pada tahap deskriptif, tetapi dapat memberikan kontribusi nyata terhadap praktik di lapangan. Inisiatif seperti @awaskbgo menjadi contoh nyata bagaimana teori kritis, khususnya cyberfeminis, dapat diimplementasikan dalam bentuk gerakan digital yang menantang dominasi patriarki di ruang maya. Dengan memahami KBGO sebagai fenomena struktural, penelitian ini mendorong penguatan literasi digital berbasis gender, advokasi kebijakan yang berpihak pada korban, dan pemberdayaan perempuan di bidang teknologi.

Kedepan, penelitian tentang KBGO perlu diarahkan pada evaluasi efektivitas kampanye digital serta kolaborasi antara akademisi, organisasi advokasi, dan pembuat kebijakan. Peneliti melihat bahwa ruang digital harus dipandang sebagai bagian integral dari ruang publik modern, di mana hak-hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi, harus dijaga dengan serius. Dengan demikian, penelitian KBGO memiliki peran strategis dalam membangun fondasi pengetahuan dan aksi nyata untuk menciptakan ekosistem digital yang bebas dari kekerasan, inklusif, serta memberdayakan perempuan dan kelompok rentan di masa depan.

5.2 Implikasi

Penelitian yang mengangkat isu Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kekerasan yang dialami perempuan di ruang digital. Jika dianalisis melalui perspektif cyberfeminis, penelitian ini menegaskan bahwa teknologi digital bukanlah sesuatu yang netral, melainkan sarana yang dapat memperkuat maupun meruntuhkan struktur kekuasaan patriarki.

Cyberfeminis memandang dunia maya sebagai wadah politik di mana gender, kekuasaan, dan teknologi saling berinteraksi. Oleh karena itu, implikasi praktis penelitian ini tidak sekadar menyoroti bentuk kekerasan online, tetapi juga menawarkan strategi pemberdayaan perempuan agar mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat emansipasi. Salah satu implikasi paling nyata adalah pentingnya meningkatkan literasi digital yang berperspektif gender. Melalui temuan penelitian, dapat disusun program edukasi yang mengajarkan perempuan cara melindungi data pribadi, mengenali ancaman seperti pelecehan daring atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, serta membangun kesadaran tentang hak digital mereka. Literasi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat kerentanan perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan di internet.

Lebih jauh, penelitian mengenai KBGO ini dalam kerangka cyberfeminis juga menekankan perlunya menciptakan ruang digital yang aman. Hal ini dapat diterapkan melalui pengembangan fitur-fitur keamanan di platform media sosial, seperti tombol *report*, *block*, serta peningkatan pengawasan konten berbahaya

berbasis gender. Temuan penelitian ini memberikan dasar argumentasi yang kuat bagi advokasi agar platform digital lebih bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada penggunanya. Berdasarkan praktiknya, konsep ruang aman ini juga diwujudkan melalui komunitas online yang saling mendukung, seperti kelompok solidaritas perempuan di media sosial yang berfokus pada pendampingan korban KBGO.

Cyberfeminis percaya bahwa membangun ekosistem digital yang inklusif tidak hanya melibatkan teknologi, tetapi juga solidaritas sosial yang berkelanjutan. Dengan adanya ruang aman tersebut, perempuan dapat mengekspresikan diri secara bebas, membangun jejaring, dan mengartikulasikan identitasnya tanpa rasa takut terhadap kekerasan berbasis gender.

Implikasi praktis penelitian ini melalui perspektif cyberfeminis juga tampak pada advokasi kebijakan publik berbasis gender. Penelitian ini dapat menjadi dasar ilmiah untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih berpihak kepada korban kekerasan online. Misalnya, rekomendasi penelitian dapat digunakan untuk mendesak pembaruan undang-undang ITE, pembentukan mekanisme pengaduan daring yang lebih responsif, serta kebijakan yang mewajibkan platform digital untuk menghapus konten kekerasan berbasis gender dengan cepat. Cyberfeminis mengajarkan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya dilihat sebagai aturan teknis, tetapi juga sebagai instrumen politik yang berperan dalam menantang ketidakadilan gender di dunia maya. Oleh karena itu, penelitian mengenai KBGO dapat memperkuat posisi aktivis, LSM, dan

akademisi dalam mendesak negara dan industri teknologi agar lebih peka terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender online. Di sisi lain, perspektif cyberfeminis menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam teknologi sebagai implikasi jangka panjang.

Hasil Penelitian mengungkap bahwa sebagian besar teknologi, baik dari sisi desain maupun kebijakan algoritma, masih bias gender karena didominasi oleh perspektif patriarki. Oleh karena itu, penelitian ini mendorong keterlibatan perempuan sebagai inovator dan pembuat teknologi, bukan sekadar pengguna. Hal ini selaras dengan visi cyberfeminis yang melihat teknologi sebagai alat pembebasan perempuan jika diakses secara setara. Selain itu, pemberdayaan ini juga memungkinkan lahirnya inovasi teknologi yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, termasuk aplikasi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap pelecehan online atau platform edukasi yang mengangkat isu kesetaraan gender. Akhirnya, penelitian ini dengan pendekatan cyberfeminis memiliki implikasi penting dalam normalisasi diskursus anti-patriarki di dunia maya. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap kekerasan berbasis gender online tidak hanya memerlukan strategi teknis, tetapi juga perubahan budaya digital.

Melalui kampanye media sosial, gerakan *hashtag activism* seperti #LawanKBGO, atau konten edukatif, kesadaran publik mengenai kesetaraan gender dapat dibangun secara luas. Pendekatan cyberfeminis mendorong perempuan dan kelompok marginal untuk menciptakan narasi tandingan yang

menentang stereotip gender, mendekonstruksi misogini, dan memperkuat solidaritas di ruang digital. Dengan menggabungkan hasil penelitian,advokasi kebijakan, serta gerakan akar rumput di dunia maya, teori cyberfeminis menawarkan peta jalan menuju transformasi ruang digital yang lebih adil dan setara bagi semua. Secara keseluruhan, implikasi praktis penelitian mengenai KBGO melalui perspektif cyberfeminis menegaskan bahwa transformasi ruang digital menuju keadilan gender membutuhkan kombinasi antara pengetahuan akademik, teknologi, kebijakan publik, dan gerakan sosial. Pendekatan cyberfeminis menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi arena perlawanan yang efektif jika digunakan untuk membongkar struktur kekuasaan patriarki dan membangun ruang aman bagi semua individu, khususnya perempuan.

Hasil penelitian ini berperan sebagai landasan strategis untuk merumuskan langkah konkret seperti penguatan literasi digital gender-sensitif, advokasi kebijakan perlindungan korban, serta peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang bagi narasi tandingan yang menolak normalisasi kekerasan online dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk budaya digital yang inklusif. Dengan demikian, perspektif cyberfeminis tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, tetapi juga solusi praktis yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko KBGO sekaligus memperluas kesempatan perempuan untuk berdaya di era digital.

5.3. Saran-saran

1. Tingkatkan literasi digital

Peneliti menyarankan agar literasi digital terus diperkuat, terutama dalam perspektif gender. Masyarakat perlu memahami cara menggunakan media sosial dengan aman, mengetahui hak-hak digital mereka, serta mampu mengenali dan merespons bentuk-bentuk KBGO sejak dini.

2. Perkuat regulasi hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, perlindungan hukum terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terdapat sejumlah rekomendasi yang perlu dipertimbangkan guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu memperkuat kerangka hukum yang secara spesifik mengatur tentang KBGO melalui pembaruan dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kedua regulasi tersebut harus dioptimalkan dalam penegakan hukum, khususnya melalui penerapan pasal-pasal yang relevan terhadap tindakan penyebaran konten bermuatan kekerasan seksual, pelecehan daring, dan pelanggaran privasi individu. Kedua, pemerintah bersama lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu mengembangkan pedoman teknis penanganan kasus KBGO yang

berperspektif korban, agar proses hukum dapat berjalan adil dan tidak menimbulkan reviktimisasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik kekerasan berbasis digital, termasuk penggunaan alat bukti elektronik yang sah serta perlindungan data pribadi korban.

3. Peran platform media sosial

Peneliti menekankan pentingnya keterlibatan aktif dari pihak platform digital. Media sosial harus menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses, merespons laporan dengan cepat, serta melindungi identitas dan keamanan korban agar tidak mengalami reviktimisasi.

4. Pemberdayaan perempuan

Berdasarkan analisis, perempuan masih menjadi kelompok paling rentan dalam kasus KBGO, kerentanan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan pengetahuan tentang keamanan digital, rendahnya literasi teknologi, serta masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat di ruang publik maupun digital. Kondisi ini membuat perempuan lebih mudah menjadi sasaran pelecehan, intimidasi, dan eksploitasi melalui media daring.. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar pemerintah, lembaga pendidikan, serta organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan program pelatihan keterampilan teknologi dan keamanan digital yang berperspektif gender, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian

perempuan dalam menggunakan serta mengamankan identitas digitalnya. Pelatihan tersebut hendaknya mencakup kemampuan praktis seperti pengelolaan privasi daring, keamanan kata sandi, pencegahan doxing, identifikasi ancaman siber, serta prosedur pelaporan kasus KBGO secara aman dan efektif. Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat literasi digital perempuan, tetapi juga berfungsi sebagai strategi preventif untuk menekan angka kekerasan berbasis gender di ruang digital. Dengan meningkatnya kemampuan teknologis perempuan, mereka dapat lebih berdaya dalam mengontrol akses terhadap data pribadi, menghindari potensi kejahatan siber, dan berpartisipasi secara aman di ruang digital. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keamanan digital merupakan langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem digital yang setara, aman, dan berkeadilan gender di Indonesia.

5. Kampanye berkelanjutan

Inisiatif kampanye digital yang telah dilakukan SAFEnet melalui akun @awaskbgo dinilai sangat bermanfaat. Peneliti mendorong agar kampanye semacam ini terus diperluas dan diperkuat dengan konten yang kreatif, mudah dipahami, dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

6. Kerja sama semua pihak

Penanggulangan KBGO tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Peneliti menyarankan adanya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, serta komunitas digital untuk membangun

ekosistem ruang maya yang aman dan setara. dibutuhkan sinergi lintas sektor antara lembaga negara, lembaga layanan, dan organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, yang selama ini aktif melakukan advokasi, edukasi, dan pendampingan terhadap korban KBGO. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang holistik, mulai dari tahap pencegahan, penanganan kasus, hingga pemulihan korban.

7. Penelitian lanjutan

Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian-kajian selanjutnya. Disarankan agar penelitian selanjutnya berfokus pada evaluasi efektivitas kampanye digital yang telah dilakukan oleh berbagai organisasi dan lembaga advokasi, guna menilai sejauh mana pesan-pesan kampanye tersebut mampu meningkatkan kesadaran publik, mendorong perubahan perilaku, dan memperkuat empati sosial terhadap korban KBGO. Selain itu, diperlukan pula studi tentang pola pelaporan korban, termasuk hambatan struktural, psikologis, dan sosial yang memengaruhi keputusan korban untuk melapor atau mencari bantuan hukum. Pemahaman mendalam terhadap pola pelaporan ini penting untuk merancang sistem pelaporan yang lebih ramah korban dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengeksplorasi bagaimana interaksi antara sistem sosial dan teknologi dapat dikembangkan secara sinergis untuk meminimalkan potensi KBGO secara sistematis. Hal ini mencakup analisis mengenai peran algoritma media sosial, kebijakan moderasi konten, serta desain platform digital yang berorientasi pada

keamanan dan kesetaraan gender. Dengan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, dan sosial, penelitian di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem digital yang inklusif, aman, serta berkeadilan gender, sekaligus memperkuat dasar empiris bagi penyusunan kebijakan publik yang efektif dalam pencegahan dan penanganan KBGO di Indonesia.

